



**RENCANA KERJA
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 24 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif.

Sehingga, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) PD.

Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target Renja berupa

output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2019. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergi segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan dan dinamika di urusan pangan, pertanian dan perikanan.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansi kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Pencapaian target - target yang telah ditetapkan, apakah dalam tahun kedua RPJMD Kabupaten Wonosobo, sudah sesuai target. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan pangan, pertanian dan perikanan dilaksanakan untuk

meningkatkan produksi pangan, pertanian dan perikanan untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pelaksanaan pembangunan produksi pangan, pertanian dan perikanan pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2018 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2019;

3. Memprediksi dinamikan dan kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;
4. Mempertimbangkan sinergi antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan asas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2019 merupakan penjabaran dari skema RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2019 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2016 – 2021. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena

memuat seluruh kebijakan publik.

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Renja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Renja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan RENJA SKPD Tahun 2018 ini adalah :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Wonosobo berdasarkan Renja SKPD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA SKPD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
2. Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan

Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2019.

Tujuan penyusunan RENJA SKPD Tahun 2019 adalah: Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II ISU-ISU PENTING DAN PENELAAHAN USULAN

2.1 Analisis Renja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian Renja pelayanan SKPD berdasarkan indikator Renja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan Renja pelayanan.

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan gambaran sejauh mana tingkat Renja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target Renja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN LALU

2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator Renja yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dengan realisasinya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian yang semakin baik, atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Renja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan indikator Renja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator Renja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikatornya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian Target Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Renstra	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Pencapaian Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya masyarakat bermartabat, berbudaya dan berdikari	Skor PPH	Skor	92,00	83,00	90,22%	110,84%
	Persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	96,00	167,17	174,13%	
	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	88,00	60,00	68,18%	
Meningkatkan produksi dan produktivitas daerah serta pengelolaan sumber daya dan potensi	Jumlah Luas Lahan Perikanan	Ha	2.502,90	221,86	8,86%	103,26%
	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	10.340.663,41	9.193.361,00	88,90%	
	Jumlah Produksi Benih Ikan	Kg	54.368.375	4.000.000	7,36%	
	Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	46,78	43,94	93,93%	
	Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	1 : 35	1 : 31	112,90%	
	Rasio kelompok tani ternak terhadap peternak	Rasio	1 : 20	1 : 9	222,22%	
	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	gr/kap/hr	2.229	1.968	88,29%	
	Rata-rata konsumsi protein nabati	gr/kap/hr	72,00	73,80	102,50%	
	Rata-rata konsumsi protein hewani	gr/kap/hr	42,00	58,30	138,81%	
	Rata-rata konsumsi ikan perkapita	gr/kap/hr	13,26	13,31	100,38%	
	Jumlah Lumbung Pangan	Lumbung	23	33	143,48%	
	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa	28	31	110,71%	

Sasaran Strategis	Indikator Renja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Pencapaian Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
	Jangkauan pemasaran produk pertanian / perkebunan	Jangkauan Pemasaran	lokal, regional, nasional	lokal, regional, nasional	100,00%	
	Jumlah komoditas yang bersertifikat	Komoditas	2	2	100,00%	
	Produksi tanaman pangan					
	- padi	ton	165.854	167.855	101,21%	
	- jagung	ton	111.994	86.189	76,96%	
	- ubi kayu	ton	182.158	171.584	94,20%	
	- ubi jalar	ton	18.310	15.612	85,26%	
	Produktivitas tanaman pangan	ton/ha	5,23	5,17	98,93%	
	Jumlah Produksi Hortikultura	kw	2.083.366	4.089.552	196,30%	
	Jumlah Produksi Buah-buahan	kw	1.392.085	1.016.586	73,03%	
	Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka	kw	3.147.152	3.928.988	124,84%	
	Jumlah Produksi Bunga	tangkai	2.671.525	2.709.960	101,44%	
	Jumlah Produksi Perkebunan	ton	5.654	7.661	135,50%	
	Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	1 : 5	1 : 13	38,46%	
	Jumlah Kasus Penyakit Ternak	Ekor	150	580	386,67%	
	Presentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani	%	85,00	80,00	94,12%	

Sasaran Strategis	Indikator Renja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Pencapaian Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Populasi Ternak Besar	ekor	22.888	23.228	101,49%	
	Jumlah populasi Ternak Kecil	ekor	273.233	272.835	99,85%	
	Jumlah populasi Unggas	ekor	1.394.533	3.163.735	226,87%	
	Jumlah Produksi Telur	ton	1.605.200	1.953.324	121,69%	
	Jumlah Produksi Susu	ton	789,785	817,830	103,55%	
	Jumlah Produksi Daging	ton	8.234.540	8.634.899	104,86%	
	Jangkauan pemasaran produk peternakan	Jangkauan Pemasaran	lokal, regional	lokal, regional	100,00%	
	Persentase teknologi peternakan yang diterapkan	Jenis	5	5	100,00%	

Dari tabel 2 di atas, jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target.

1. Terwujudnya Masyarakat Bermartabat, Berbudaya Dan Berdikari

Sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya masyarakat bermartabat, berbudaya dan berdikari. Untuk sasaran strategis pertama ini ada 3 (tiga) indikator Renja utama yang harus dipenuhi. Dari ketiga indikator Renja utama ini capaian target Renjanya rata-rata 110,84 % (sangat berhasil). Pencapaian sasaran tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

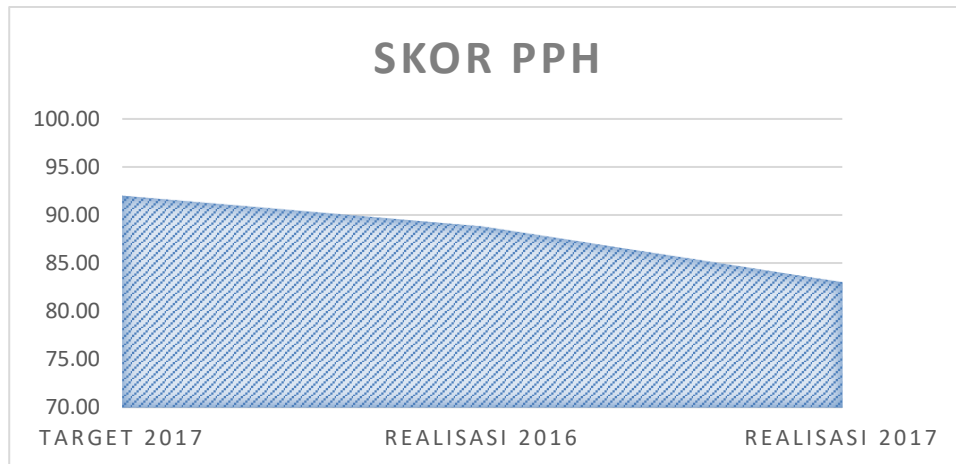
Tabel 2. Pencapaian Target Sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

Indikator Renja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Peningkatan / Pengurangan
1	2	3	4	5	6
Skor PPH	Skor	92,00	88,80	83,00	-5,80
Persentase ketersediaan bahan pangan utama	%	96,00	237,29	167,17	-70,13
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88,00	73,00	60,00	-13,00

Capaian indikator Skor PPH pada tahun 2017 lebih rendah daripada tahun 2016 dan target 2017. Hal ini disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi berimbang. Meningkatnya harga bahan pangan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak

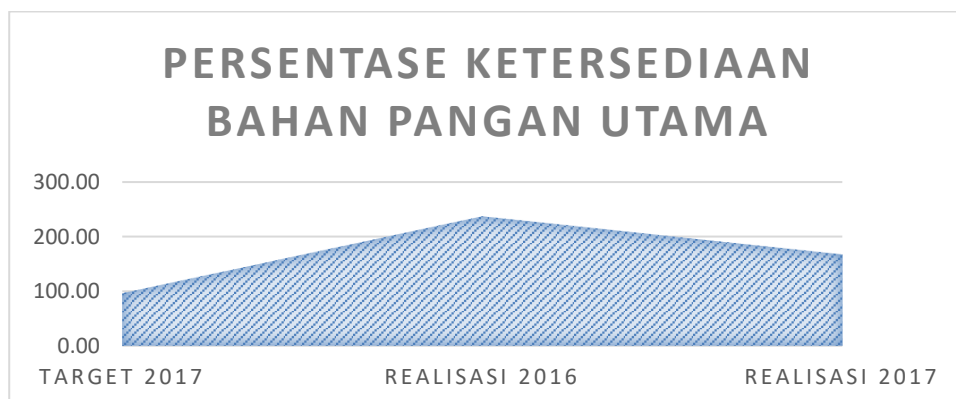
goreng, terigu, kedelai, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam. Tidak dapat diimbangi oleh tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung stagnan.

Gambar 1. Skor PPH



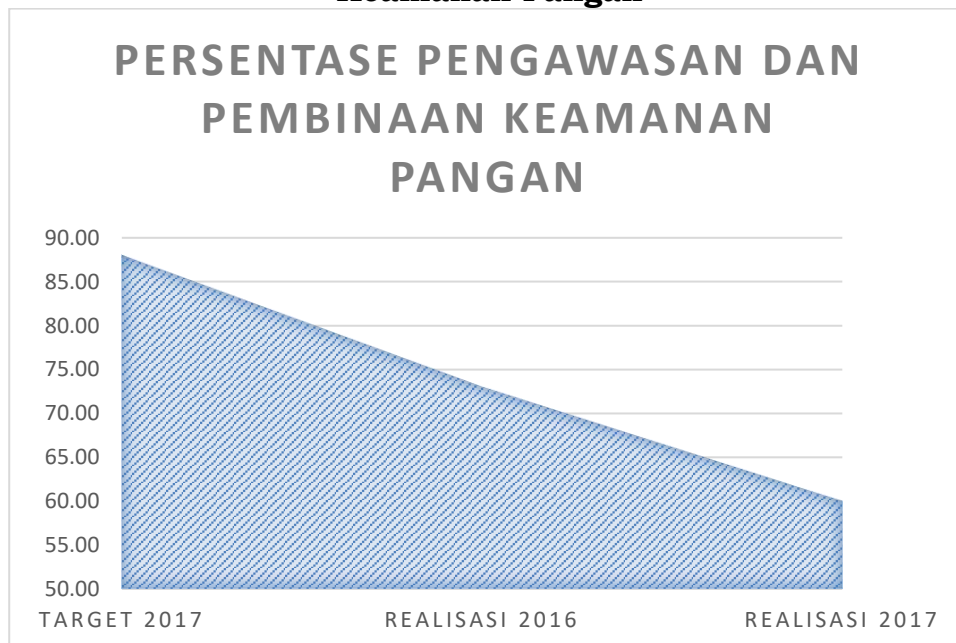
Sedangkan pada indikator persentase ketersediaan bahan pangan utama, capaian tahun 2017 dibawah capaian tahun 2016, meskipun lebih tinggi daripada target. Berkurangnya ketersediaan bahan pangan utama akibat besarnya konsumsi bahan pangan utama disinyalir menjadi permasalahan dalam ketersediaan bahan pangan utama. Konsumsi masyarakat yang semakin tinggi, tidak mampu diimbangi oleh produksi bahan pangan utama, meskipun produksi bahan pangan utama tahun ini meningkat daripada tahun lalu.

Gambar 2. Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Utama



Untuk indikator Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, capaiannya masih dibawah tahun 2016 dan target. Masih banyaknya bahan pangan yang mempunyai kandungan bahan berbahaya baik pewarna, pengawet maupun zat aditif lainnya di pasaran, membuat keamanan pangan di Kabupaten Wonosobo masih belum bisa terjamin. Meskipun, personel Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan telah sering melakukan pemeriksaan keamanan pangan secara berkala dan acak.

Gambar 3. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan



Pencapaian sasaran strategis pertama ini tidak lepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu :

1. Fasilitasi Peningkatan Potensi Pangan Lokal (DBHCHT).
- 2. Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Daerah Serta Pengelolaan Sumber Daya Dan Potensi**

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas daerah serta pengelolaan sumber daya dan potensi, dengan indikator Renja sejumlah 35 (tiga puluh lima). Dari ke-35

indikator tersebut, capaian target Renjanya adalah 103,26 % (sangat berhasil). Pencapaian sasaran tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 3. Pencapaian Target Renja Sasaran Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016

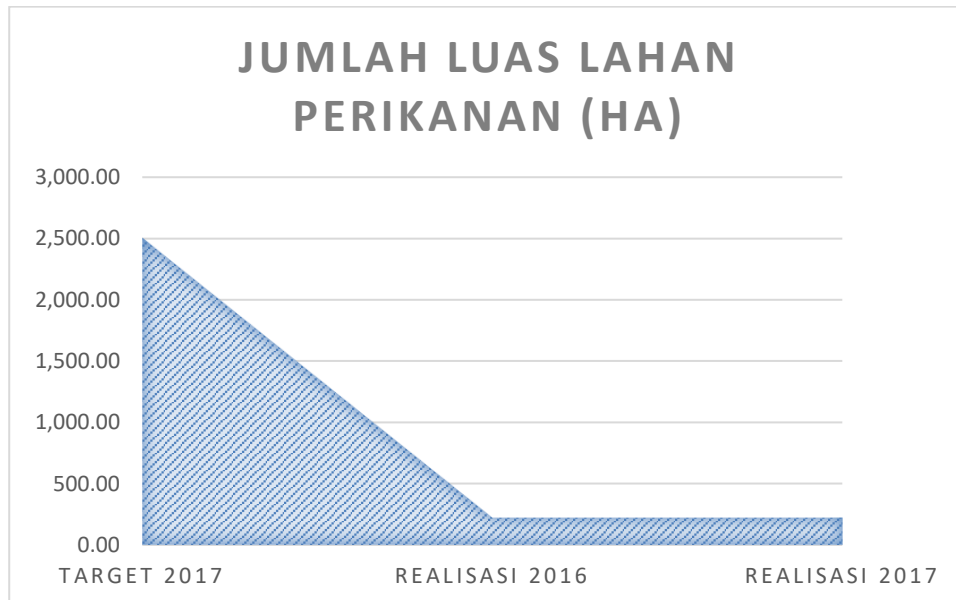
Indikator Renja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Peningkatan / Pengurangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah Luas Lahan Perikanan	Ha	2.502,90	221,86	221,86	0,00
Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	10.340.663,41	9.102.300,00	9.193.361,00	91.061,00
Jumlah Produksi Benih Ikan	Kg	54.368.375	11.390.115	4.000.000	-7.390.115,06
Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	46,78	43,94	43,94	0,00
Rasio kelompok tani terhadap petani	Rasio	1 : 35	1 : 35	1 : 31	4,00
Rasio kelompok tani ternak terhadap peternak	Rasio	1 : 20	1 : 19	1 : 9	10,00
Rata-rata konsumsi pangan per kapita	gr/kap/hr	2.229	2.115	1.968	-146,80
Rata-rata konsumsi protein nabati	gr/kap/hr	72,00	40,10	73,80	33,70
Rata-rata konsumsi protein hewani	gr/kap/hr	42,00	22,60	58,30	35,70
Rata-rata konsumsi ikan perkapita	gr/kap/hr	13,26	13,45	13,31	-0,14
Jumlah Lumbung Pangan	Lumbung	23	31	33	2,00
Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa	28	29	31	2,00
Jangkauan pemasaran produk pertanian / perkebunan	Jangkauan Pemasaran	lokal, regional, nasional	lokal, regional, nasional	lokal, regional, nasional	0,00
Jumlah komoditas yang bersertifikat	Komoditas	2	2	2	0,00
Produksi tanaman pangan					
- padi	ton	165.854	167.165	167.855	690,00
- jagung	ton	111.994	77.369	86.189	8.820,00
- ubi kayu	ton	182.158	207.924	171.584	-36.340,00
- ubi jalar	ton	18.310	21.963	15.612	-6.351,00

Produktivitas tanaman pangan	ton/ha	5,23	5,51	5,17	-0,34
Jumlah Produksi Hortikultura	kw	2.083.366	4.971.225	4.089.552	-881.673,00
Jumlah Produksi Buah-buahan	kw	1.392.085	1.462.206	1.016.586	-445.620,00
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka	kw	3.147.152	6.274.477	3.928.988	-2.345.489,00
Jumlah Produksi Bunga	tangkai	2.671.525	3.189.117	2.709.960	-479.157,00
Jumlah Produksi Perkebunan	ton	5.654	8.522	7.661	-860,95
Rasio penyuluh terhadap kelompok tani	Rasio	1 : 5	1 : 5	1 : 13	-8
Indikator Renja Utama	Satuan	Target 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Peningkatan / Pengurangan
Jumlah Kasus Penyakit Ternak	Ekor	150	580	580	0,00
Presentase Kasus Penyakit Ternak yang Tertangani	%	85,00	80,00	80,00	0,00
Jumlah Populasi Ternak Besar	ekor	22.888	21.950	23.228	1.278,00
Jumlah populasi Ternak Kecil	ekor	273.233	264.282	272.835	8.553,00
Jumlah populasi Unggas	ekor	1.394.533	3.092.399	3.163.735	71.336,00
Jumlah Produksi Telur	ton	1.605.200	1.787.369	1.953.324	165.955,00
Jumlah Produksi Susu	ton	789,785	560,357	817,830	257,47
Jumlah Produksi Daging	ton	8.234.540	7.979.243	8.634.899	655.656,00
Jangkauan pemasaran produk peternakan	Jangkauan Pemasaran	lokal, regional	lokal, regional	lokal, regional	0,00
Jumlah Temuan Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan yang Sudah Diterapkan	Jenis	5	5	5	0,00

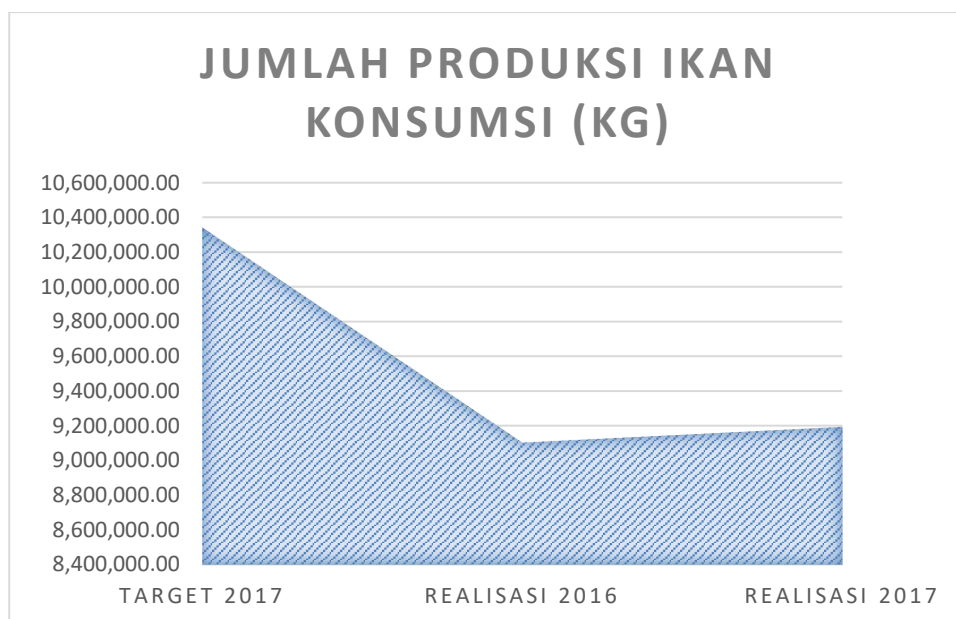
Jumlah Luas Lahan Perikanan, tidak berubah dari pencapaian 2016, meskipun dibawah target. Terbatasnya lokasi pembudidayaan ikan, karena secara agroklimat di Kabupaten Wonosobo yang mempengaruhi produktivitas budidaya perikanan. Juga, penggunaan sumber-sumber air yang semakin bersaing dengan penggunaan lain. Capaian indikator Jumlah Produksi Ikan Konsumsi, lebih tinggi dari pencapaian 2016, meskipun dibawah target. Hal ini karena meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan, sehingga produktivitas ikan menjadi meningkat.

Meskipun cukup banyak tantangan yang dihadapi, seperti agroklimat dan penyakit ikan.

Gambar 4. Jumlah Luas Lahan Perikanan



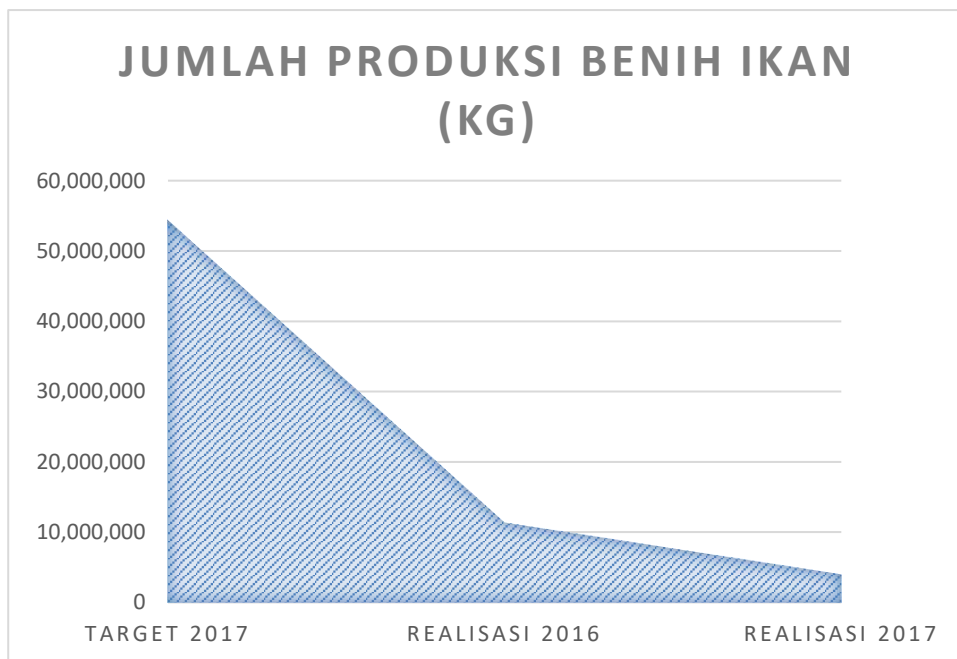
Gambar 5. Jumlah Produksi Ikan Konsumsi



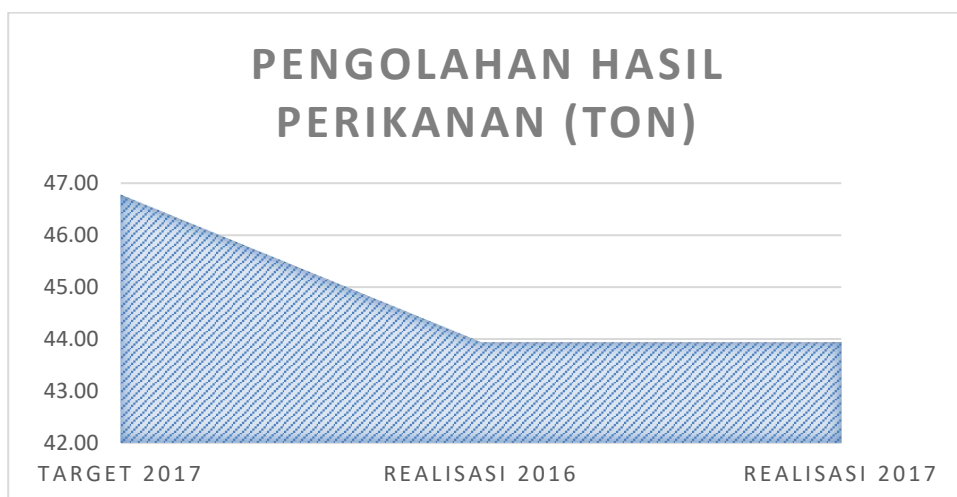
Untuk Indikator Jumlah Produksi Benih Ikan, capaian tahun 2017 dibawah capaian 2016 dan target. Hal ini bisa dicermati dari beberapa faktor, seperti belum optimalnya peran BBI dalam penyediaan benih di masyarakat dan belum banyaknya pembenihan ikan di masyarakat dan sedikitnya induk ikan

berkualitas. Indikator Pengolahan Hasil Perikanan, capaiannya sama dengan capaian 2016, meskipun masih dibawah target. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat Wonosobo tentang pengolahan ikan dan kurangnya jumlah dan konsistensi pasokan ikan untuk usaha pengolahan hasil ikan.

Gambar 6. Jumlah Produksi Benih Ikan



Gambar 7. Jumlah Pengolahan Hasil Perikanan

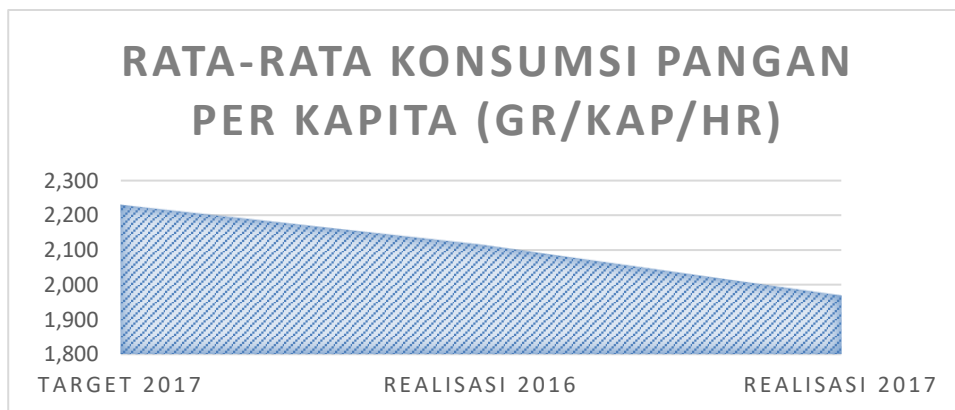


Pada capaian indikator rasio kelompok tani terhadap petani, didapatkan hasil bahwa capaian tahun 2017 lebih tinggi dari

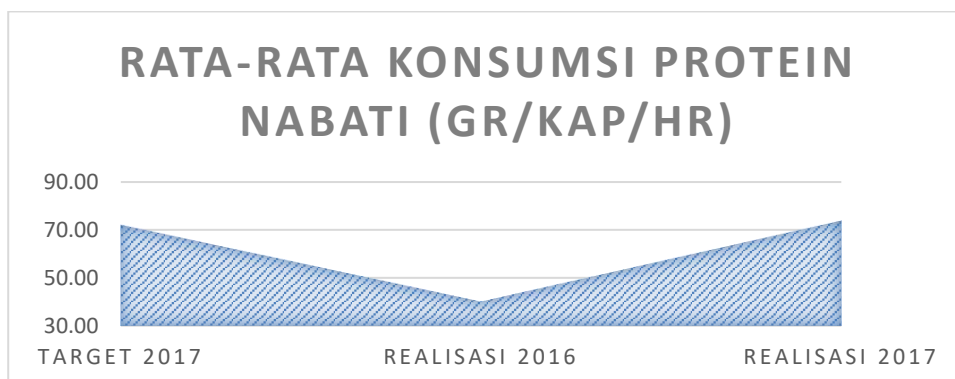
capaian 2016 dan target. Hal ini berarti semakin banyak petani yang telah bergabung dalam kelompok tani. Seperti juga capaian indikator rasio kelompok tani terhadap petani, capaian rasio kelompok tani ternak terhadap peternak juga lebih tinggi daripada capaian 2016 dan target. Yang menunjukkan bahwa semakin banyak peternak yang telah bergabung dalam kelompok tani ternak.

Sedangkan untuk rata-rata konsumsi pangan per kapita, capaiannya lebih rendah daripada capaian 2016 dan target. Hal ini karena menurunnya daya beli masyarakat. Meningkatnya harga produk pangan, pada saat pendapatan masyarakat cenderung tetap. Ada peningkatan pada capaian indikator rata-rata konsumsi protein nabati. Tercukupinya ketersediaan dan terjangkaunya harga jual bahan pangan berprotein nabati menjadi faktor penentu dalam capaian tersebut.

Gambar 8. Rata-Rata Konsumsi Pangan Per Kapita

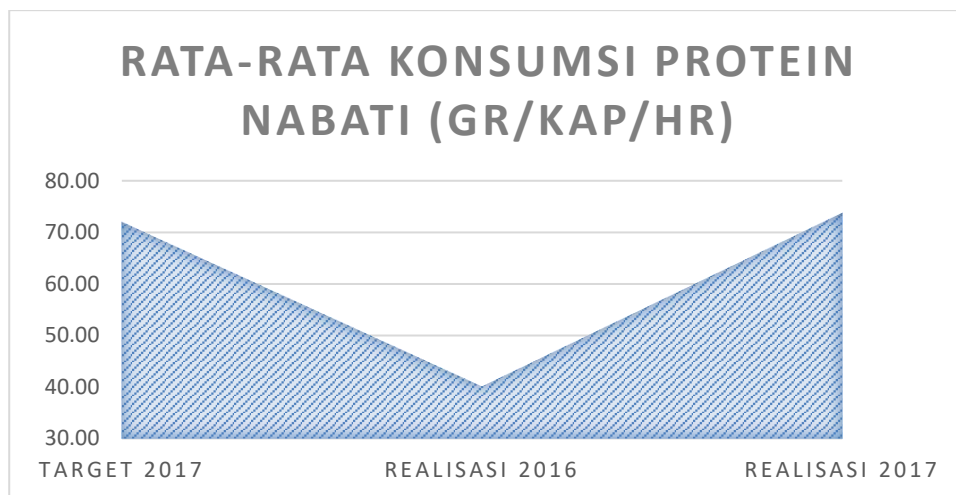


Gambar 9. Rata-Rata Konsumsi Protein Nabati

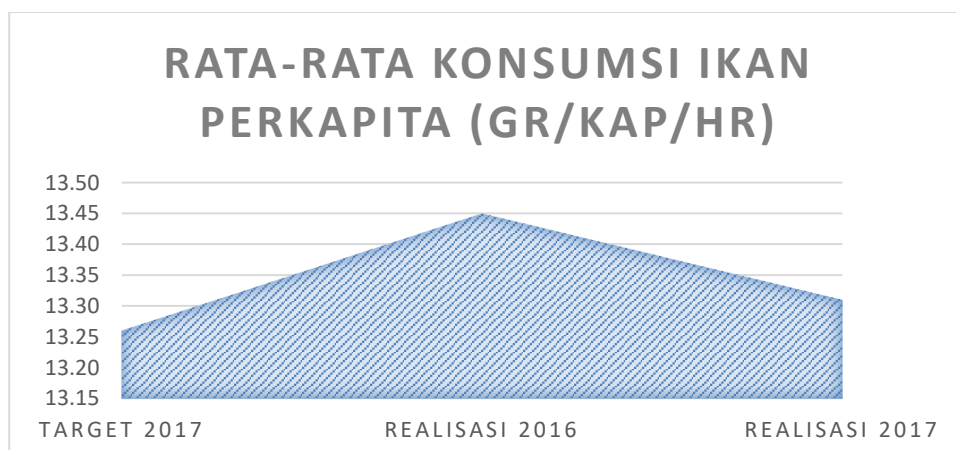


Sedangkan rata-rata konsumsi protein hewani di Kabupaten Wonosobo juga lebih tinggi dari capaian 2016 dan target. Hal ini karena beralihnya konsumsi bahan protein hewani masyarakat dari daging sapi ke bahan yang lebih terjangkau dan murah, seperti : unggas dan ternak kecil, ikan dan telur. Untuk konsumsi rata-rata konsumsi ikan perkapita menurun dari capaian tahun 2016, tetapi lebih tinggi daripada target. Sebabnya adalah meningkatnya harga ikan, meskipun masih relatif terjangkau dan penurunan daya beli masyarakat.

Gambar 10. Rata-Rata Konsumsi Protein Hewani



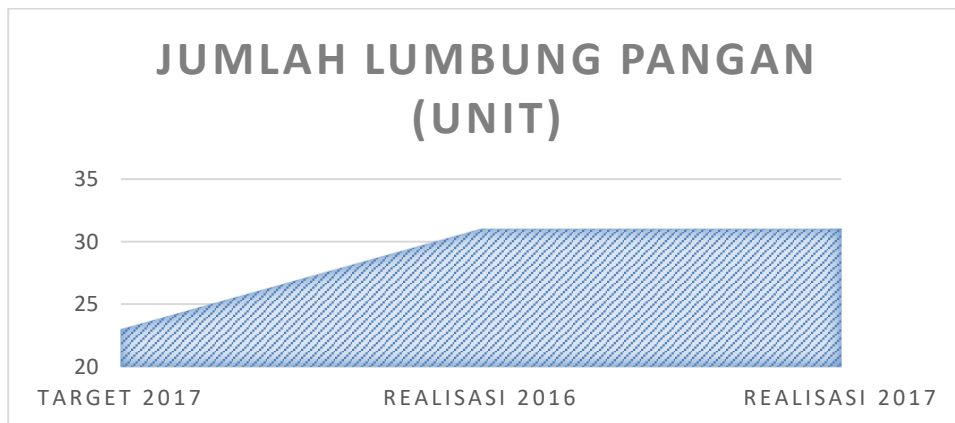
Gambar 11. Rata-Rata Konsumsi Ikan



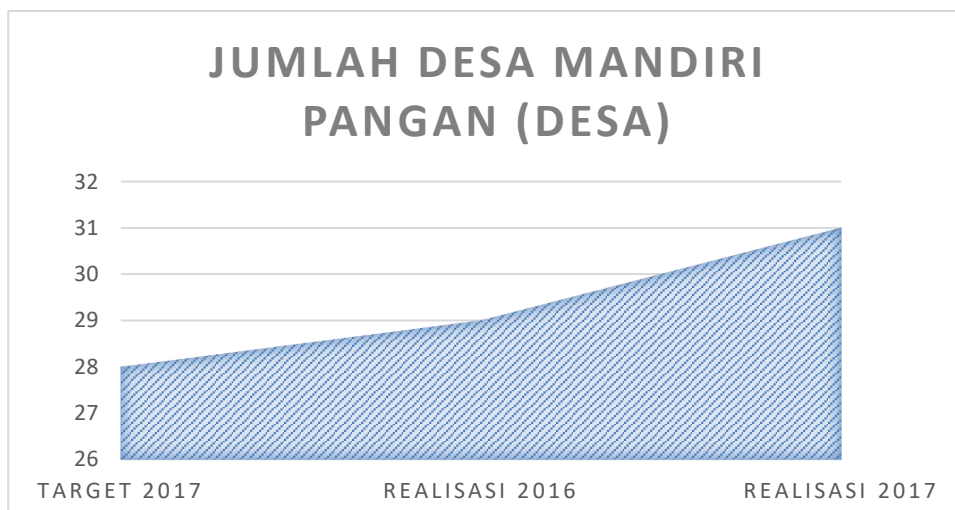
Pada capaian jumlah lumbung pangan, capaian 2017 sama dengan capaian 2016 dan lebih tinggi dari target. Hal ini karena

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya tempat penyimpanan beras untuk persediaan apabila terjadi kerawanan pangan. Jumlah Desa Mandiri Pangan pada 2017 meningkat dari 2016 dan diatas target. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya konsumsi bahan pangan lokal dan pangan alternatif selain beraslah yang menjadi sebabnya. Sementara, jangkauan pemasaran produk pertanian / perkebunan telah mencapai target dari tahun lalu, dan berlanjut di tahun 2017. Hal ini menunjukkan, semakin dikenalnya produk pertanian / perkebunan dari Wonosobo.

Gambar 12. Jumlah Lumbung Pangan



Gambar 13. Jumlah Desa Mandiri Pangan

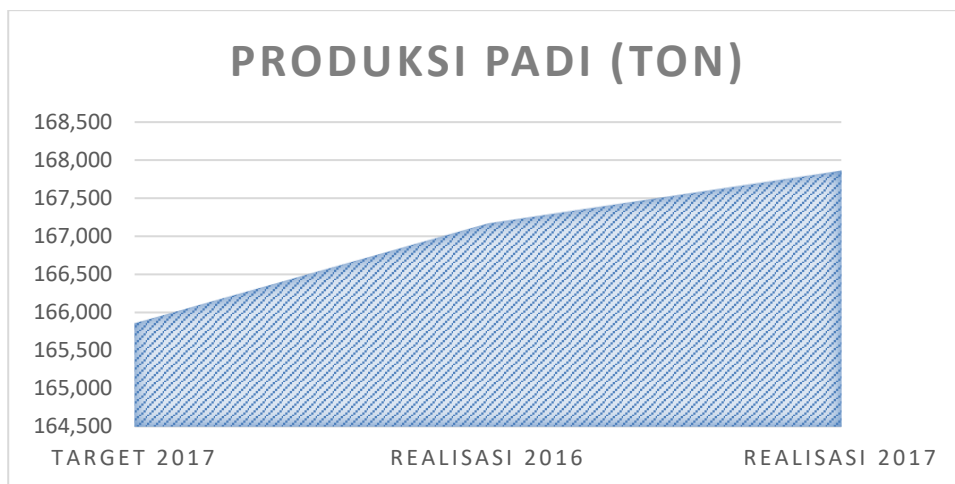


Jumlah komoditas yang bersertifikat di Kabupaten adalah 2, yaitu Dombos dan Gula Semut. Jumlah komoditas yang

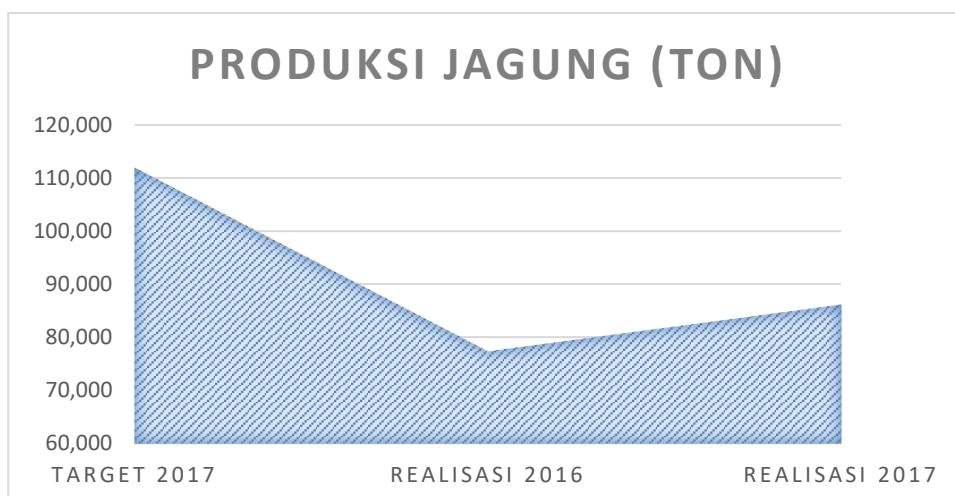
bersertifikat telah memenuhi target dari beberapa tahun lalu. Sehingga, pemasaran kedua komoditas tersebut lebih mudah.

Jumlah produksi padi lebih tinggi dari capaian tahun 2016 dan target. Hal ini disebabkan luas panen yang meningkat, meskipun produktivitas tanaman padi menurun. Produksi jagung pada tahun 2017 lebih tinggi dari produksi tahun 2016, tapi lebih rendah dari target. Hal ini karena luas panen dan produktivitas meningkat. Untuk produksi ubi kayu dan ubi jalar di tahun 2017 lebih rendah dari tahun 2016 dan target. Yang disebabkan, luas panen dan produktivitas menurun.

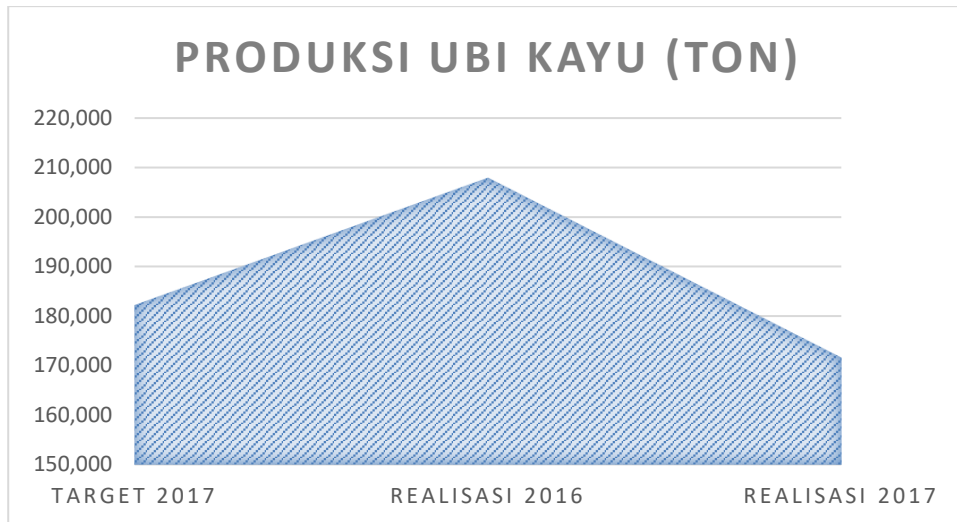
Gambar 14. Produksi Padi



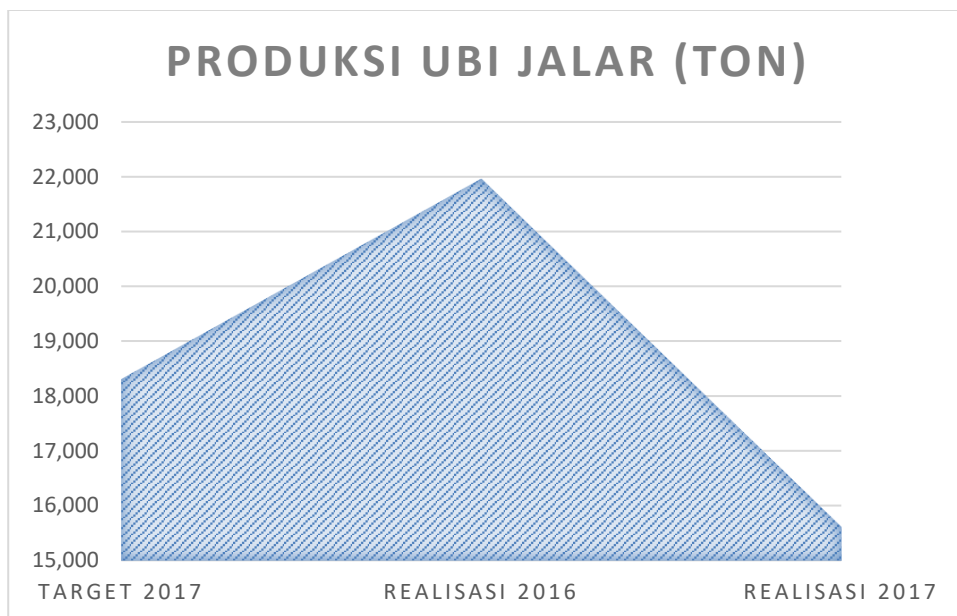
Gambar 15. Produksi Jagung



Gambar 16. Produksi Ubi Kayu



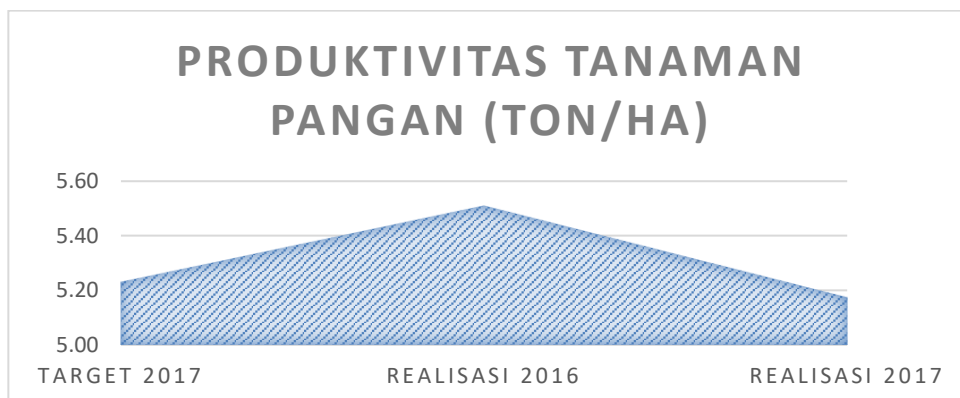
Gambar 16. Produksi Ubi Jalar



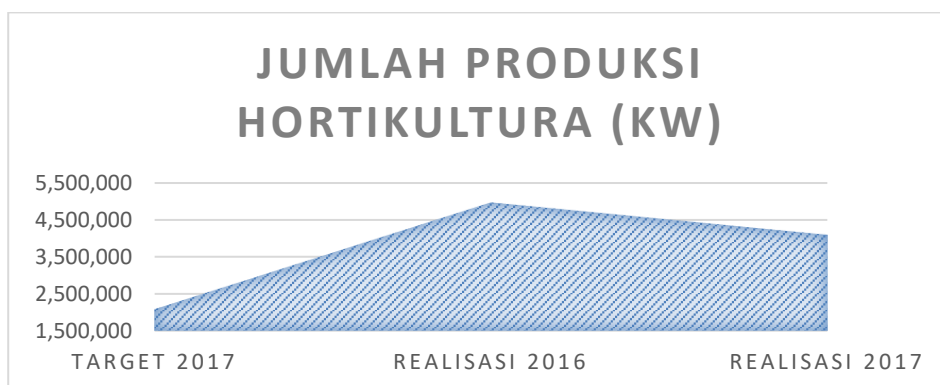
Produktivitas tanaman pangan, lebih rendah daripada capaian 2016, juga masih dibawah target. Sebabnya adalah serangan OPT meningkat dan agroklimat yang membuat produksi tanaman pangan berkurang. Sedangkan untuk jumlah produksi hortikultura, capaiannya dibawah capaian 2016, tetapi diatas target. Penurunan tersebut terjadi karena serangan OPT meningkat, dan cuaca ekstrim, yang membuat banyak tanaman hortikultura yang mati / rusak. Sementara, produksi buah-buahan tahun 2017 masih dibawah produksi 2016 dan target,

disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim, sehingga mengganggu perkembangan bunga dan buah.

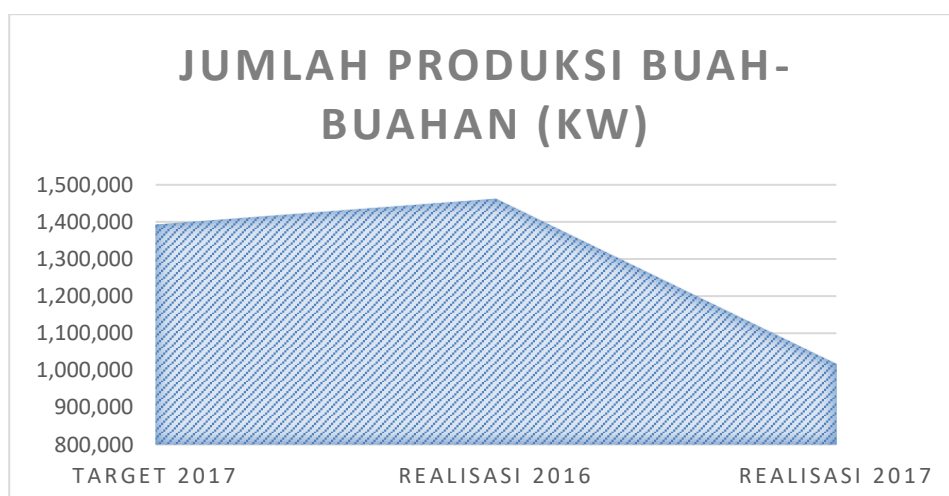
Gambar 17. Produktivitas Tanaman Pangan



Gambar 18. Jumlah Produksi Hortikultura

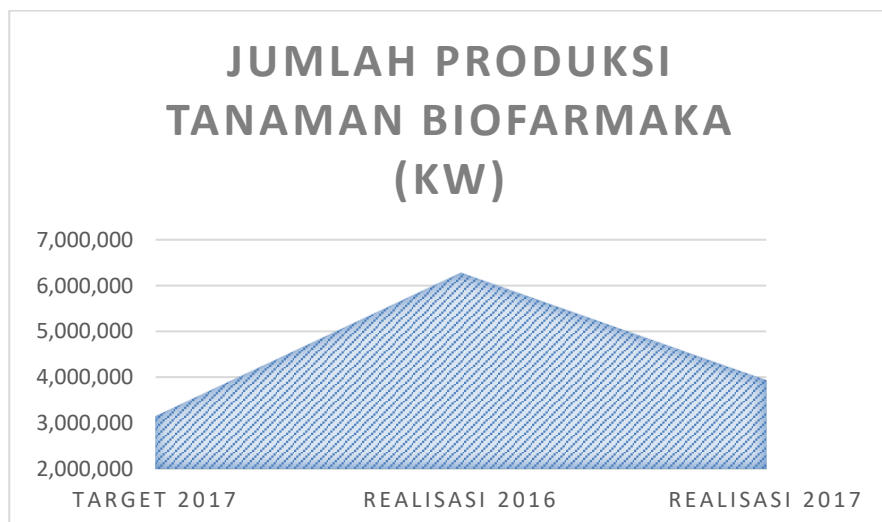


Gambar 19. Jumlah Produksi Buah-buahan

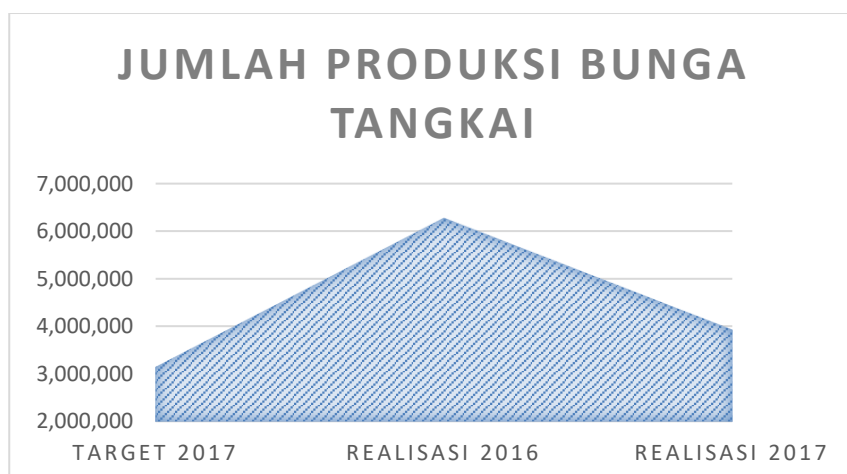


Untuk tanaman biofarmaka, jauh menurun bila dibandingkan dengan produksi tahun 2016, tetapi masih sedikit diatas target. Penyebabnya adalah disebabkan luas panen dan produktivitas yang menurun. Hal tersebut yang juga dialami oleh produksi bunga, dimana produksi bunga 2017 masih dibawah 2016, tapi diatas target. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tanaman bunga menurun disebabkan luas panen yang berkurang cukup signifikan. Tren tersebut juga terjadi pada jumlah produksi perkebunan. Produksi menurun karena perubahan iklim yang ekstrim, sehingga mengganggu perkembangan bunga dan biji.

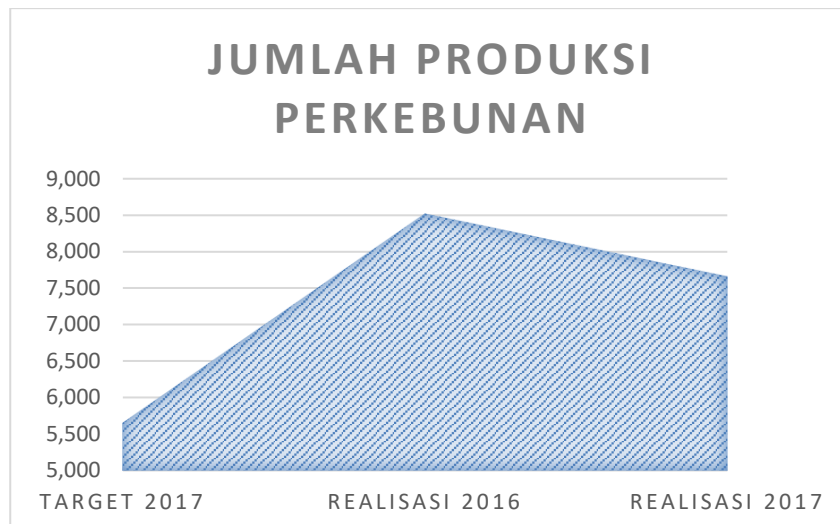
Gambar 20. Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka



Gambar 21. Jumlah Produksi Bunga



Gambar 22. Jumlah Produksi Perkebunan



Pada rasio penyuluh dengan petani, rasionya menurun bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2016 dan target. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian akibat banyaknya penyuluh yang pensiun / meninggal dunia.

Sedangkan jumlah kasus penyakit ternak pada 2017, sama dengan kasus 2016, tetapi meningkat jauh diatas target. Penyebabnya adalah tidak maksimalnya pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke Kabupaten Wonosobo, kurangnya pengetahuan peternak untuk memeriksakan ternak sakitnya secara dini, juga masih rendahnya pengetahuan peternak mengenai tata laksana peternakan. Hal yang serupa terjadi pada persentase kasus penyakit ternak yang tertangani. Hal ini masih berkaitan dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit ternak diatas. Dimana, masih ada peternak yang tidak menyetujui penanganan kesehatan pada ternaknya, terlambatnya laporan penyakit dari peternak dan kurangnya personel kesehatan hewan.

Selanjutnya, untuk populasi ternak besar, capaiannya diatas capaian tahun 2016 dan target. Meningkatnya minat peternak untuk memelihara ternak besar, karena harga ternak besar yang semakin meningkat dan relatif stabil. Pada populasi ternak kecil, capaiannya diatas capaian 2016, meskipun masih dibawah target. Meningkatnya minat peternak untuk memelihara

ternak kecil, karena harga ternak kecil yang semakin meningkat dan pemeliharaan ternak kecil yang relatif mudah. Sementara, populasi ternak unggas jauh diatas populasi 2016 dan target Meningkatnya minat peternak untuk memelihara ternak unggas, karena harga ternak unggas yang semakin meningkat dan pemeliharaan ternak unggas yang semakin mudah.

Seiring meningkatnya populasi unggas, produksi telur juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 dan target. Meningkatnya minat peternak untuk memelihara unggas petelur, juga meningkatnya produktivitas ternak. Pada produksi susu, mengalami kenaikan dari tahun 2016 dan target. Hal tersebut karena meningkatnya populasi dan produktivitas ternak sapi perah. Hal yang sama juga terjadi pada produksi daging. Produksi daging pada tahun 2017 diatas produksi 2016 dan target. Sebabnya dalah peningkatan pemotongan ternak untuk konsumsi sehari-hari dan hari besar yang meningkat.

Pada jangkauan pemasaran produk peternakan, jangkauan pemasaran produk peternakan telah mencapai target, yaitu di tingkat regional. Hal tersebut menunjukkan semakin dikenalnya produk peternakan dari Wonosobo. Sedangkan untuk Jumlah Temuan Teknologi Tepat Guna Bidang Peternakan yang sudah Diterapkan, capaiannya juga telah menemui target. Hal ini menunjukkan usaha peternakan di Wonosobo didominasi oleh pengelolaan peternakan secara tradisional, yang sebagian besar masih belum bisa menyerap teknologi akibat kekurangan modal dan pengetahuan.

2.2 Isu Penting / Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok, dan Fungsi

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari permasalahan bidang pangan yaitu:

1. Keseimbangan antara ekspor dan impor terhadap komoditi

- tertentu yang menyebabkan rawannya masalah harga dan ketersediaan bahan pangan;
2. Keterbatasan sistem informasi harga yang dapat diakses petani dan kelayakan harga ditingkat petani masih rendah;
 3. Keterbatasan akses terhadap sumber data, sehingga keakuratan data ketahanan pangan masih harus disempurnakan;
 4. Kurangnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 5. Belum kuatnya kelembagaan pangan;
 6. Penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam yang belum optimal;
 7. Kurangnya informasi terhadap pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal sebagai sumber pangan dan sumber gizi keluarga;
 8. Mayoritas penduduk Indonesia makanan pokoknya beras sehingga ketergantungan kepada beras sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan beras menjadi komponen utama ketahanan pangan nasional;
 9. Penganekaragaman pangan yang belum optimal;
 10. Terbatasnya teknologi pengolahan pangan;
 11. Kesadaran individu / pelaku usaha pangan terhadap keamanan pangan masih kurang;
 12. Penanganan daerah rawan pangan belum maksimal;
 13. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat tentang rawan pangan dan gizi buruk antar daerah dan waktu;
 14. Kurangnya sosialisasi tentang mutu produk yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
 15. Masih rendahnya kesadaran IKM/UKM tentang pengawasan mutu yang baik dan aman sehingga daya saing produk pangan kurang diminati.

Kemudian isu dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Wonosobo yang adalah

:

1. Kepemilikan lahan budidaya petani sempit;
2. Kebanyakan pelaku usaha di bidang pertanian adalah buruh tani, dan penyewa lahan;
3. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola usaha di bidang pertanian;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada ditingkat petani;
5. Pelaku usaha dan utama pertanian belum menggunakan manajemen usaha yang baik;
6. Pemilihan tanaman yang akan ditanam petani. lebih mengutamakan tanaman yang sedang menjadi trend pada saat itu;
7. Kelembagaan pekebunan masih perlu ditingkatkan ke arah kelembagaan yang profesional, produktif dan mandiri,
8. Kurangnya sosialisasi informasi dalamantisipasi Perubahan iklim global (anomali iklim);
9. Jumlah penyuluh pertanian lapangan masih kurang dibanding jumlah kelompok tani yang ada.

Kemudian isu dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Perikanan di Kabupaten Wonosobo yang adalah :

1. Besarnya biaya pemeliharaan akibat tingginya harga pakan;
2. Pembudidaya ikan di Kabupaten Wonosobo didominasi oleh pembudidaya skala kecil dengan sistem tradisonal;
3. Akses permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas;
4. Ketersediaan benih bermutu tinggi masih terbatas;
5. Ketersediaan air yang semakin terbatas dan bersaing dengan hajat hidup / keperluan lainnya.

2.2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 17 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;
- f. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
- g. Program Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- k. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;
- l. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo

serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, maka pada tahun 2019 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2018 dan 2017.

Pada tahun 2018 telah direncanakan 12 program dengan 60 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 13.188.082.800,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo, APBN dan DAK.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Wonosobo yang telah dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2018, secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Wonosobo mengusulkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian baik pokok maupun penunjang dalam pembangunan pertanian

Adapun kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Kemanan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor;
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pembinaan dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Tani (DBHCHT);
2. Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Tani.

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

1. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;
2. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DBHCHT);
4. Survey Produktifitas Lahan;
5. Pengadaan Cadangan Pangan (DBHCHT);
6. Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian/Perkebunan;

7. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
8. Pengadaan Cadangan Pangan.

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Benih dan Bibit Perkebunan dan Hortikultura (DBHCHT);
2. Pelatihan dan Pengembangan Penangkar Benih Sayuran (DBHCHT);
3. Pendampingan UPSUS PAJALAI (pajak rokok);
4. Pengembangan Tanaman Buah-buahan di Dataran Tinggi;
5. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT);
6. Sosialisasi Pemetaan Lahan LP2B;
7. Pengembangan Benih dan Bibit Perkebunan dan Hortikultura;
8. Pelatihan dan Pengembangan Penangkar Benih Sayuran.

g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan.

h. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak.

i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pengembangan dan Pelestarian Ternak Domba Wonosobo;
2. Peningkatan Pelayanan UPT RPH;
3. Pengembangan Agropolitan;
4. Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal;
5. Penunjang UPSUS SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting).

j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak (DBHCHT);
2. Fasilitasi Edukasi Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan yang Asuh;
3. Pembinaan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing;
4. Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak;

k. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

1. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan;
2. Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal;

l. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK);
2. Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan);
3. Restocking di Perairan Umum;

4. Fasilitasi Pengawas Perikanan Perairan Umum;
5. GEMARIKAN;
6. Pengembangan dan Pengelolaan Budidaya Ikan;
7. Pengembangan Usaha Mina Padi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018, permasalahan pelayanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Kementrian Pertanian	a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	a. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas
Tercapainya Pertumbuhan :	b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.	b. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air.	b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian Pertanian dan Perikanan
Ubi Kayu 2,15%	c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.	c. Status dan luas kepemilikan lahan petani sangat terbatas.	c. Revitalisasi infrastruktur pertanian
Ubi Jalar 3,14%	d. Menurunnya kesuburan lahan pertanian.	d. Menurunnya kesuburan lahan pertanian.	d. Penerapan teknologi ramah lingkungan

Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Padi 0,67%	e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum optimal.	e. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal.	
Jagung 1,63%	f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit	f. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga kredit usahatani.	
Tercapainya Produksi :	g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	g. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.	
Buah 1,64%	h. Belum padunya kerjasama antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.		
Sayuran 1,59%	i. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi di bidang pertanian dan perikanan.		
Tan. Obat 3,03%	j. Makin berkembangnya hama dan penyakit tanaman dan hewan		
Daging 4,33%			
Telur 3,78%			
Susu 5,86%			
Skor PPH 1,92%			
Konsumsi Protein 0,32%			
Provinsi Jawa Tengah			
Tercapainya Pertumbuhan:			
Padi 0,30%			
Jagung 0,30%			
Daging 0,93%			
Susu 2,00%			
Telur 1,87%			

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Terwujudnya sektor pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman, mempunyai konsistensi dalam produksi dan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan ditunjang oleh SDM yang kompeten secara teknis dan manajemen. Tujuan dan sasaran dalam pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019, yaitu sebagaimana terlihat dari tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Dalam Pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan Di Kabupaten Wonosobo Pada Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renja 2019
1	2	3	4	5
Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Skor PPH	75%
		Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Memenuhi Syarat ASUH (Aman, Sehat, utuh dan Halal)	90,00%
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan	5,36
			Persentase kenaikan produksi perkebunan dan hortikultura	10,00%
Persentase kenaikan populasi ternak			23,00%	
Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	6,80%			
Meningkatkan Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	NTP	Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan	Persentase Produk Pertanian dan Perikanan yang Telah Diolah	60,00%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tupoksi. Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019, dapat dilihat sebagaimana berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor;
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pembinaan dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Tani (DBHCHT);
2. Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Badan Hukum Kelompok Tani.

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

1. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan;
2. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DBHCHT);
4. Survey Produktifitas Lahan;
5. Pengadaan Cadangan Pangan (DBHCHT);
6. Pembangunan Prasarana Pendukung Pertanian/Perkebunan;
7. Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
8. Pengadaan Cadangan Pangan.

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Pengembangan Benih dan Bibit Perkebunan dan Hortikultura (DBHCHT);
2. Pelatihan dan Pengembangan Penangkar Benih Sayuran (DBHCHT);
3. Pendampingan UPSUS PAJALAI (pajak rokok);
4. Pengembangan Tanaman Buah-buahan di Dataran Tinggi;
5. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman (SLPHT);
6. Sosialisasi Pemetaan Lahan LP2B;
7. Pengembangan Benih dan Bibit Perkebunan dan Hortikultura;
8. Pelatihan dan Pengembangan Penangkar Benih Sayuran.

g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan.

h. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

1. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pengembangan dan Pelestarian Ternak Domba Wonosobo;
2. Peningkatan Pelayanan UPT RPH;
3. Pengembangan Agropolitan;
4. Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal;
5. Penunjang UPSUS SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting).

j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak (DBHCHT);
2. Fasilitasi Edukasi Konsumsi Bahan Pangan Asal Hewan yang Asuh;
3. Pembinaan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing;
4. Penguatan Kelembagaan dan Kontes Ternak;

k. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

1. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan;
2. Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal;

l. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK);
2. Peningkatan pelayanan UPT BBI (Balai Benih Ikan);
3. Restocking di Perairan Umum;
4. Fasilitasi Pengawas Perikanan Perairan Umum;
5. GEMARIKAN;
6. Pengembangan dan Pengelolaan Budidaya Ikan;
7. Pengembangan Usaha Mina Padi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan pangan, pertanian dan perikanan. Mengingat masalah pangan, pertanian dan perikanan bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah.

Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Dari hasil evaluasi di tahun 2017, perlu diperhatikan tentang ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur perlu sekali ditingkatkan baik mutu dan jumlahnya. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur (keahlian dan keterampilan) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan. Namun demikian apabila terjadi ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja, maka program/kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan harus ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dalam Renja Tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan terutama aspek pelayanan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kabupaten Wonosobo 2016-2021 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu;
- b. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator Renja;
- c. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan;
- d. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya;
- e. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mepedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo)
- f. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2019, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/ kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat. Transparansi

sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan dalam mewujudkan pelayanan prima yang dekat dan melayani;
- b. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan PD lain, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;

Demikianlah renja ini disusun, untuk dapat dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, September 2018

**KEPALA DINAS
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Ir. ABDUL MUNIR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198510 1 002